

AUDIT KASUS STUNTING

PROVINSI SULAWESI BARAT

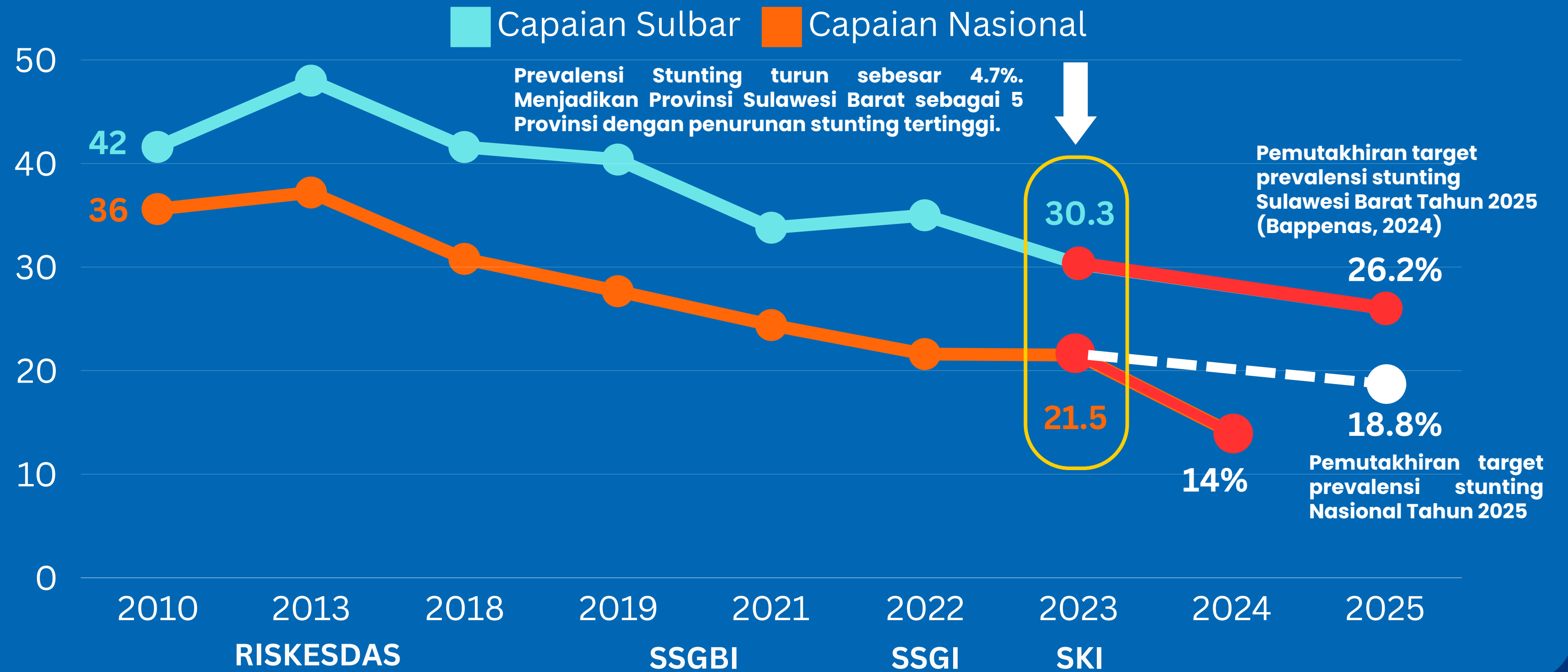


SEMESTER 1 TAHUN 2024

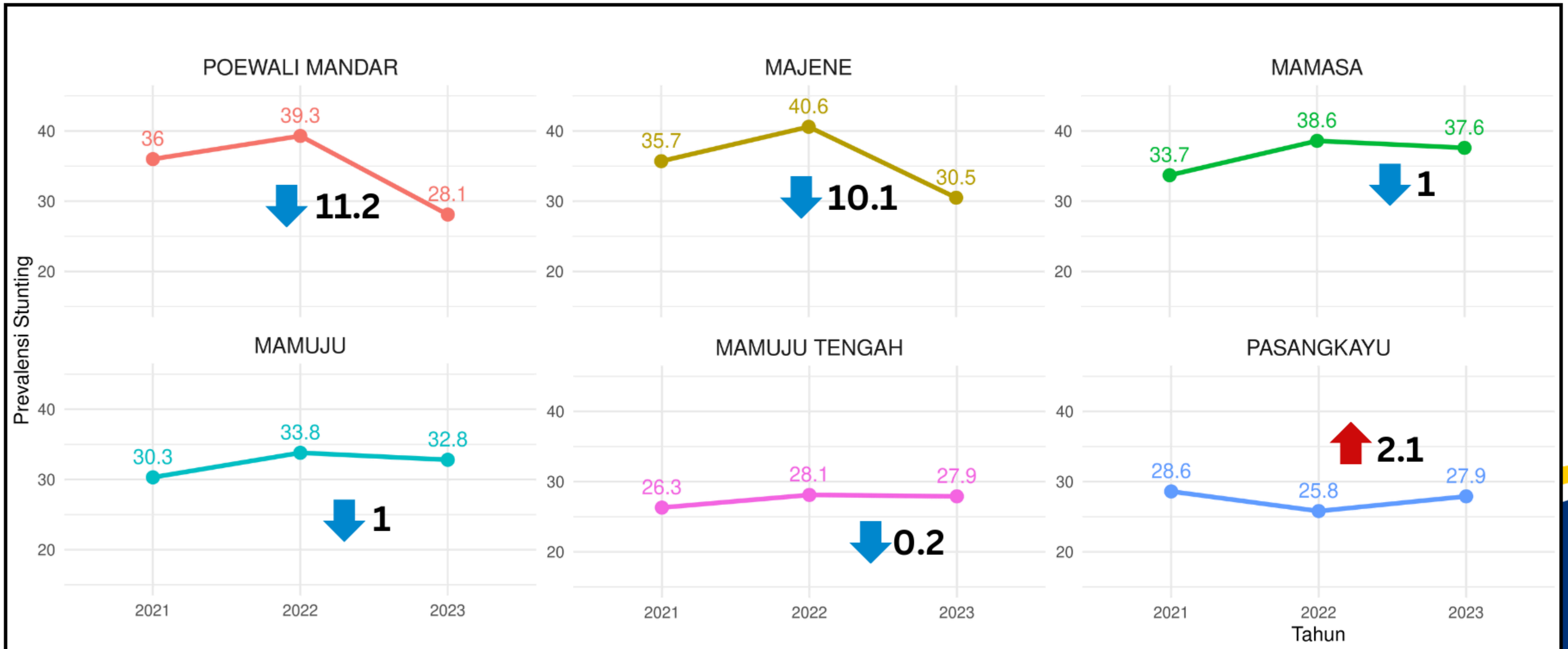
REZKY MURWANTO, S.KOM., MPH
KEPALA PERWAKILAN BKKBN SULAWESI BARAT



TREN PENURUNAN STUNTING



TREN DATA STUNTING PER KABUPATEN DI SULAWESI BARAT



AUDIT KASUS STUNTING

Pasal 9 : Audit Kasus Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e bertepatan **untuk mencari penyebab terjadinya kasus stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 8

(1) Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun **rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko Stunting.**
 (3) Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
 a. penyediaan data keluarga berisiko Stunting;
 b. pendampingan keluarga berisiko Stunting;
 c. pendampingan semua calon pengantin /calon Pasangan Usia Subur (PUS);
 d. surveilans keluarga berisiko Stunting; dan
 e. **audit kasus Stunting.**

Pasal 9

Audit kasus Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e bertujuan untuk **mencari penyebab terjadinya kasus Stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.**

Kegiatan	Keluaran (output)	Target & Tahun Pencapaian	Penanggung jawab	K/L/Pihak Pendukung
melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan Stunting	8. Terselenggaranya audit anak berusia dibawah dua tahun	Target: 50% Tahun 2024	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi dan pemangku kepentingan

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA STUNTING INDONESIA TAHUN 2021-2024

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	K/L PENGAMPU	KETERANGAN
							2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				keehatan dan gizi.									
		c. Audit Kasus Stunting	1).Terbentuknya tim audit kasus Stunting di kab/kota.	Persentase kab/kota yang memiliki tim audit Stunting.	Kab/kota	Persen	-	100	100	100	Pemerintah kab/kota	Kemendes, BKKBN	Intervensi Sensitif
			2).Pelaksanaan audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga.	Persentase pelaksanaan audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun.	Kab/kota	Persen	-	100	100	100	Pemerintah kab/kota	Kemendes, BKKBN	Intervensi Sensitif
			3).Diseminasi hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga.	Persentase diseminasi hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun.	Kab/kota	Persen	-	100	100	100	Pemerintah kab/kota	Kemendes, BKKBN	Intervensi Sensitif
			4).Tindak lanjut hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga.	Persentase tindak lanjut hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun.	Kab/kota	Persen	-	100	100	100	Pemerintah kab/kota	Kemendes, BKKBN	Intervensi Sensitif

8 AKSI KONVERGENSI

AKSI INTEGRASI 7

PENGUKURAN DAN PUBLIKASI STUNTING

7.5 TAHAPAN KEGIATAN

TAHAP 1: Mempersiapkan Rencana Jadwal Pengukuran Pertumbuhan dan Perkembangan

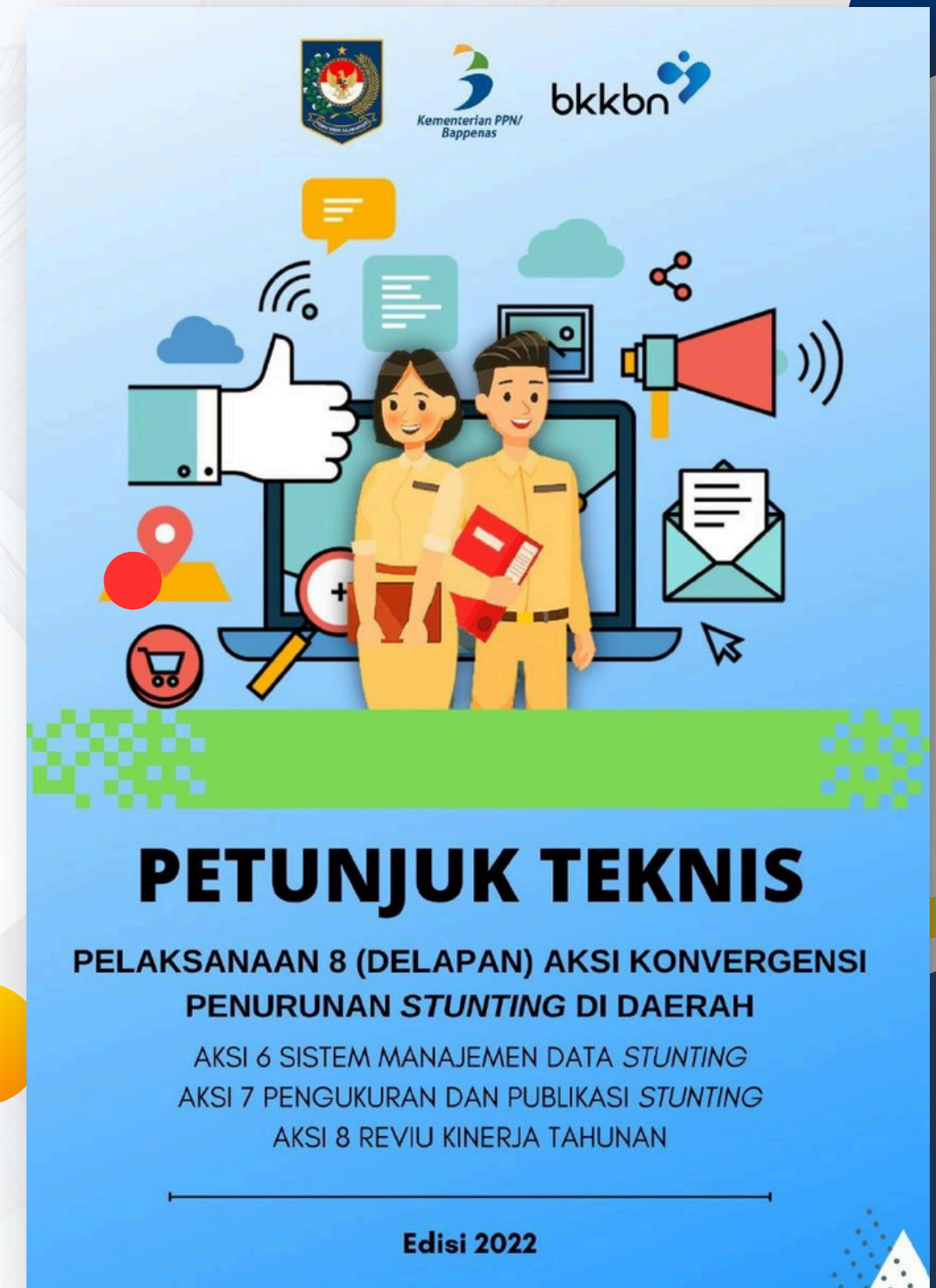
TAHAP 2: Melaksanakan Pengukuran Pertumbuhan dan Perkembangan

TAHAP 3: Mengelola Penyimpanan Data Pengukuran Pertumbuhan dan Perkembangan

TAHAP 4: Memanfaatkan Hasil Validasi dan konfirmasi Data Pengukuran untuk Memantau Kemajuan

TAHAP 5: Pelaksanaan Audit kasus stunting

TAHAP 6: Diseminasi dan Publikasi Hasil Pengukuran Pertumbuhan dan Perkembangan dan hasil audit kasus stunting.



PERATURAN BKKBN RI NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2024

Audit Kasus Stunting

Definisi : Audit kasus stunting adalah identifikasi risiko dan penyebab risiko pada kelompok sasaran berbasis surveilans rutin atau sumber data lainnya.

Kegiatan audit kasus stunting dalam 1 (satu) kali/siklus mencakup 4 (empat) tahapan audit kasus stunting yaitu:

- 1) Pembentukan tim audit kasus stunting di Kabupaten/Kota;
- 2) Pelaksanaan audit kasus stunting dan manajemen pendampingan keluarga;
- 3) Diseminasi hasil audit kasus stunting dan Rencana Tindak Lanjut
- 4) Evaluasi Rencana Tindak Lanjut dan evaluasi perubahan status risiko kasus audit stunting.

Khusus Tahap 1 dilakukan pada tahap siklus pertama.

Sasaran Kegiatan

- 1) Calon pengantin/Calon PUS; 2) Ibu hamil; 3) Ibu pascapersalinan; dan 4) Anak 0-59 bulan .

Lingkup pembiayaan dari kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan dalam proses audit kasus stunting mencakup:

- 1) Biaya konsumsi; 2) Biaya transportasi; 3) Narasumber Pakar; dan
- 4) Paket pulsa dan/atau paket data Telekonsultasi apabila koordinasi dilakukan secara daring.



AKSI PASTI
Audit Kasus Stunting Indonesia untuk 5 Pasti



Berencana Itu Keren

KALENDER AUDIT KASUS STUNTING: TINGKAT KABUPATEN/KOTA 2024- Januari 2025

Pemberian intervensi dan pendampingan auditee siklus 1



1. Konsolidasi tim AKS dan perencanaan agenda kegiatan (time line)
2. Identifikasi & seleksi kasus audit
3. Melakukan kajian & menyusun RTL
4. Diseminasi RTL

Evaluasi auditee & RTL

1. Pemberian intervensi dan pendampingan auditee AKS siklus 1 (jika diperlukan)
2. Pemberian intervensi dan pendampingan auditee siklus 2

1. **Penyampaian laporan siklus 1**
2. Konsolidasi tim AKS dan perencanaan agenda kegiatan (time line)
3. Identifikasi & seleksi kasus audit
4. Melakukan kajian & menyusun RTL
5. Diseminasi RTL

Evaluasi auditee & RTL

2025: **Penyampaian laporan siklus 2**



PROGRES AKS 1

- Identifikasi Calon Auditee
- Kajian Kasus bersama tim pakar
- Kunjungan Tim Pakar

- Rapat Koordinasi Tim AKS dan penandatanganan surat pernyataan komitmen oleh Tim AKS
- Pengumpulan data yang akan diidentifikasi dan seleksi

Revisi SK

Mei 2024

Mei 2024

Juni 2024

3 Juni 2024

30 Mei 2024

14 Juni 2024

Mamuju Tengah
Pasangkayu
Majene

Polewali Mandar

Mamuju

Mamasa

Evaluasi Rencana
Tindak Lanjut (RTL)
Audit Kasus Stunting

Diseminasi Audit Kasus
Stunting

Pelaksanaan Audit &
Manajemen Pendampingan

Pembentukan Tim Audit
Kasus Stunting

PEMETAAN SASARAN AKS KABUPATEN

Pasangkayu
Calon Pengantin : 0/2
Ibu Hamil : 2/2
Ibu Pascasalin : 0/2
Baduta : 2/2

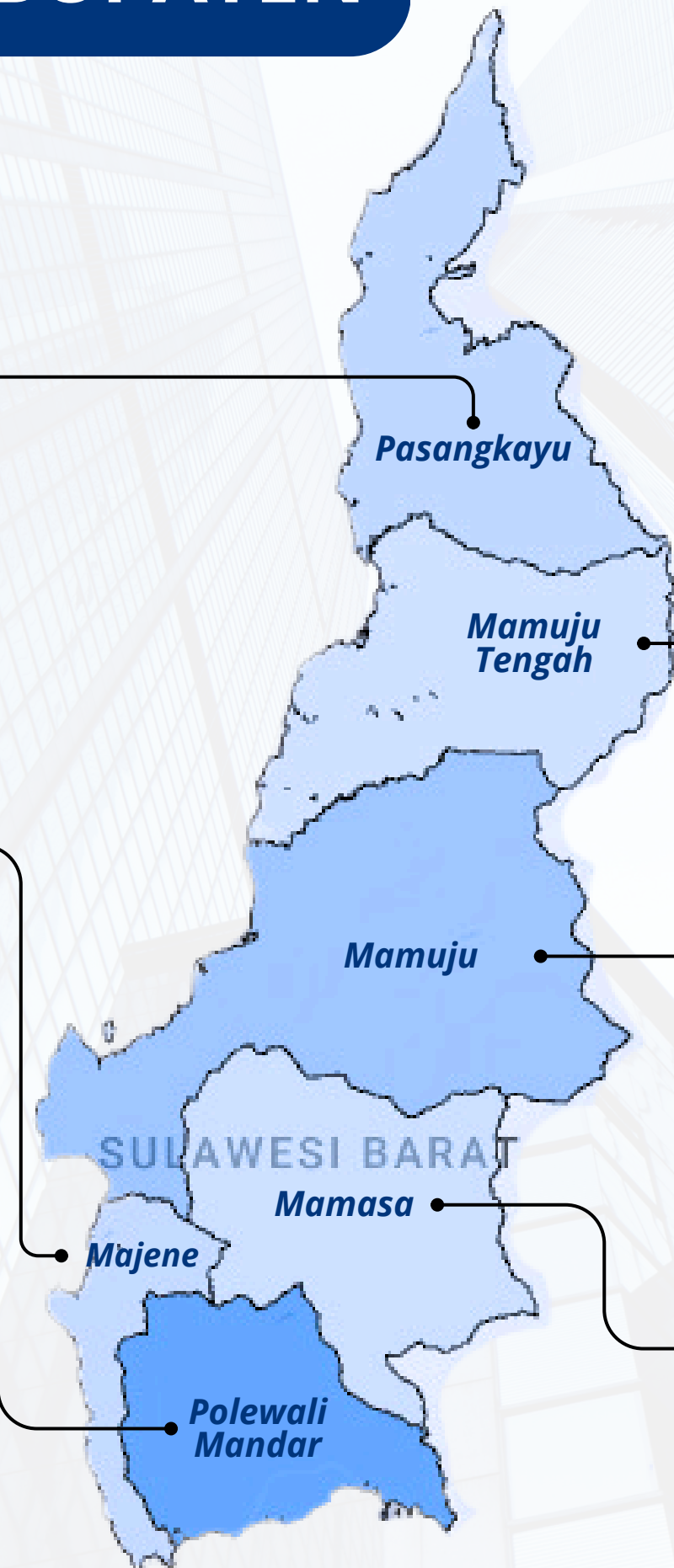
Mamuju Tengah
Calon Pengantin : 0/2
Ibu Hamil : 2/2
Ibu Pascasalin : 0/2
Baduta : 2/2

Majene
Calon Pengantin : -
Ibu Hamil : -
Ibu Pascasalin : -
Baduta : -

Mamuju
Calon Pengantin : -
Ibu Hamil : -
Ibu Pascasalin : -
Baduta : -

Polewali Mandar
Calon Pengantin : 3/2
Ibu Hamil : 17/2
Ibu Pascasalin : 12/2
Baduta : 19/2

Mamasa
Calon Pengantin : -
Ibu Hamil : -
Ibu Pascasalin : -
Baduta : -



KENDALA/PERMASALAHAN YANG DIHADAPI



Keterbatasan SDM di OPD KB

Keterbatasan sumber daya manusia di OPD KB Kabupaten dalam merencanakan, melaksanakan kegiatan AKS, serta mengelola anggaran BOKB khususnya manajemen keuangan dan administrasi anggaran.



Keterbatasan Tenaga Pakar

Keterbatasan tenaga pakar di kabupaten untuk mendukung pelaksanaan Audit Kasus Stunting



Jadwal Pelaksanaan Tidak Sinkron

Jadwal pelaksanaan tim pakar yang tidak sinkron dengan rencana tahapan pelaksanaan Audit Kasus Stunting



Adanya Kabupaten mengalami Defisit Anggaran

Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene



Terhambatnya Pencairan Anggaran BOKB

Terhambatnya proses pencairan anggaran BOKB



Keterlambatan Penyaluran Dana BOKB

Adanya keterlambatan penyaluran dana BOKB ke Kabupaten



Adanya Kegiatan lain yang diprioritas dalam penggunaan dana

Penggunaan dana BOKB diprioritaskan untuk kegiatan lain dan kurangnya akuntabilitas, sehingga menghambat pelaksanaan AKS sesuai jadwal yang diharapkan.

KONSOLIDASI DAN AKSELERASI MENU BOKB AUDIT KASUS STUNTING DAN BKB KIT STUNTING INDONESIA (KOLABORASI)

UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK PELAKSANAAN AUDIT KASUS STUNTING



Melakukan sosialisasi pedoman audit kasus stunting



Melakukan koordinasi tahapan pelaksanaan Audit Kasus Stunting kepada OPD KB Kabupaten



Melakukan advokasi kepada OPD KB Kabupaten untuk memprioritaskan pelaksanaan AKS sesuai tahapan jadwal



Melakukan monitoring pelaksanaan Audit Kasus Stunting

Upaya Yang Dilakukan Untuk Realisasi Anggaran BOKB Audit Kasus Stunting



Memastikan Pagu Anggaran AKS

Melakukan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan anggaran dana BOKB untuk memastikan pagu anggaran Audit Kasus Stunting yang dialokasikan melalui BOKB sesuai dengan pagu anggaran DPA OPD KB Kabupaten.



Koordinasi Dengan OPD KB Kabupaten

Melakukan koordinasi dengan OPD KB Kabupaten terkait penggunaan anggaran BOKB dalam hal ini bagi OPD KB yang menerima salur BOKB agar menggunakan dana SILPA yang telah tersedia dan memprioritaskan pelaksanaan Audit Kasus Stunting. **Salah satunya dengan *one on one meeting***



Fasilitasi OPD KB Kabupaten

Melakukan fasilitasi kepada OPD KB Kabupaten dalam proses pelaksanaan Audit Kasus Stunting, melalui virtual meeting secara rutin tiap bulan dan **fasilitasi AKS Coaching Clinic (melalui whatsapp)**

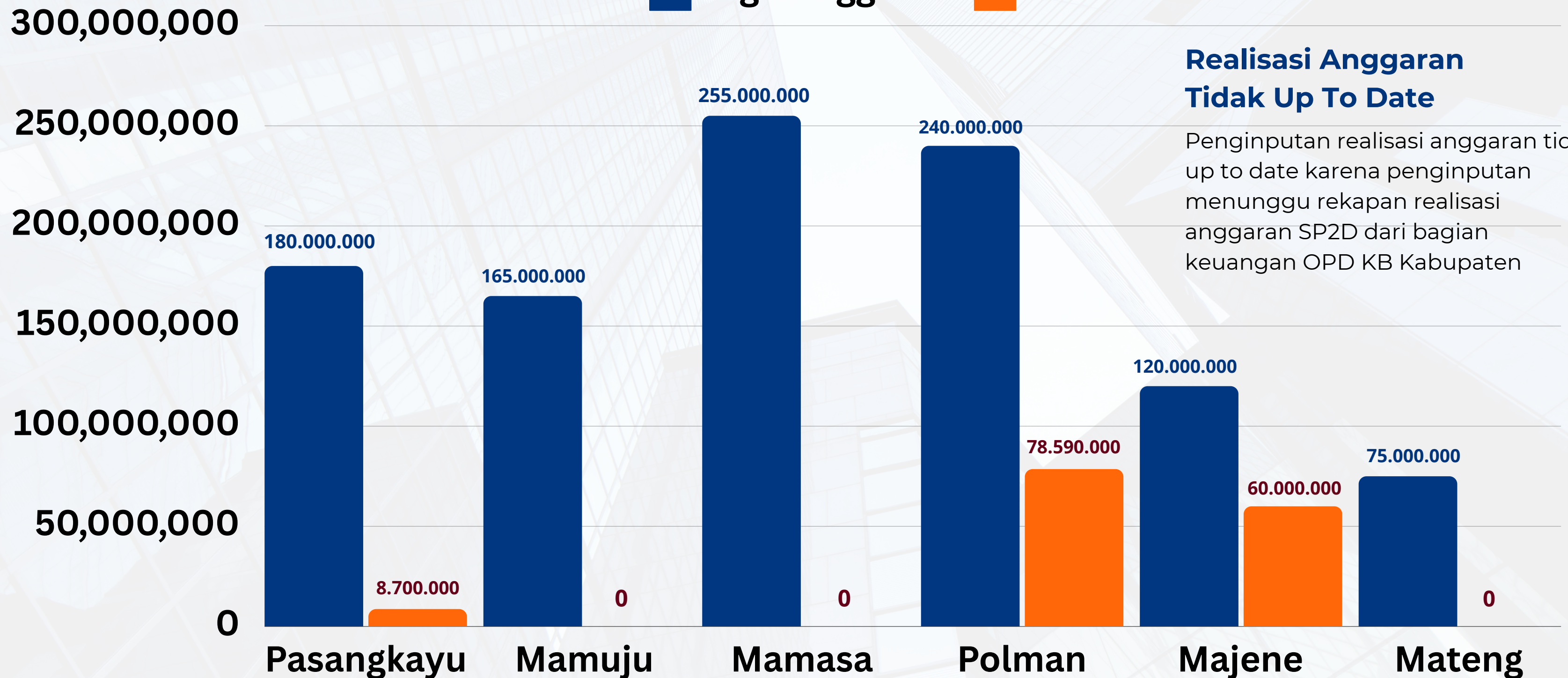


Monitoring & Pelaporan Aplikasi Morena

Melakukan monitoring tahapan pelaksanaan **Audit Kasus Stunting dan pelaporan realisasi anggaran pada Aplikasi Morena**

REALISASI ANGGARAN

■ Pagu Anggaran ■ Realisasi



Realisasi Anggaran Tidak Up To Date

Penginputan realisasi anggaran tidak up to date karena penginputan menunggu rekapan realisasi anggaran SP2D dari bagian keuangan OPD KB Kabupaten

SOLUSI YANG DILAKUKAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT



Tim Kerja Lintas Sektor

Membentuk tim kerja lintas sektor yang melibatkan OPD terkait untuk meningkatkan koordinasi, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan

Melakukan Advokasi

Melakukan advokasi kepada pemangku kepentingan dalam hal ini bupati untuk memastikan anggaran BOKB sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan (tidak dialihkan untuk pembiayaan yang lain)

Monitoring dan Evaluasi

Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin tiap bulan untuk memantau progress tahapan AKS tiap Kabupaten

Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Memastikan ketepatan waktu OPD KB melakukan penyampaian laporan keuangan melalui Morena dan penyampaian laporan keuangan ke Badan Keuangan Daerah

Fasilitasi Tenaga Pakar

Perwakilan BKKBN Provinsi melakukan fasilitasi tenaga pakar yang tersedia untuk membantu dalam pelaksanaan audit kasus stunting

INOVASI DAN PEMBELAJARAN

Melakukan pertemuan *one on one meeting* dengan OPD terkait untuk mendukung pelaksanaan Audit Kasus Stunting



Kab. Mamuju Tengah



Kabupaten Mamuju



Kabupaten Mamasa



Kab. Majene



Kab. Polewali Mandar



Kabupaten Pasangkayu

Sekian & Terima Kasih

Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat

